

**PELAKSANAAN REFOCUSING DAN REALOKASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
DALAM PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH**

Ariq Ghufran

NPP. 29.0008

*Asdaf Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh  
Program Studi Keuangan Publik*

Email: ariqsmandubs@gmail.com

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** The spread of Corona Virus Disease 2019 has a negative impact on the stability of the country's financial system so that Pidie Government directed to carried out refocussing and reallocation of APBD in 2021 fiscal year. **Purpose:** This study aims to find out how the implementation of refocussing and reallocation of the Regional Budget revenue and expenditure in Fiscal Year 2021 in Pidie Regency, obstacles and efforts in the implementation of refocussing and reallocation of the APBD. **Method:** This study uses descriptive qualitative methods with inductive approaches. As well as using observation techniques, wawancara and documentation. **Result:** The results showed that the implementation of refocussing and reallocation of apbd in Pidie Regency is not in accordance with the specified time, but it is in accordance with the target set. In its implementation there are several obstacles including there have been activities and cooperation with third parties implemented in the first quarter, the number of new regulations in a short time and the weak response to the latest direction of the Central Government. **Conclusion:** The Pidie Regency Government through the Pidie Regency Budget Team, in which the Pidie Regency Financial Management Agency has carried out refocussing and reallocating the APBD for the Acceleration of Covid-19 Handling Activities. The obstacles experienced by the Pidie Regency government in carrying out the refocusing and reallocation of the APBD are many regulations that have been issued in a short period of time and the regional apparatus has carried out programs and activities. **Keywords:** *Refocussing*, Reallocation, APBD

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penyebaran Covid-19 berdampak buruk terhadap system keuangan negara sehingga pemerintah daerah termasuk Kabupaten Pidie diarahkan untuk melaksanakan kegiatan *refocusing* dan realokasi APBD pada Tahun Anggaran 2021. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan refocussing dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 di Kabupaten Pidie, hambatan serta upaya dalam pelaksanaan refocussing dan realokasi APBD tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif serta menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan refocussing dan realokasi APBD di Kabupaten Pidie tidak sesuai waktu yang ditentukan, akan tetapi sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa

hambatan diantaranya telah terdapat kegiatan dan kerjasama dengan pihak ketiga yang dilaksanakan pada Triwulan I, banyaknya peraturan baru dalam waktu yang singkat serta lemahnya respon terhadap arahan terbaru Pemerintah Pusat. **Kesimpulan:** Pemerintah Kabupaten Pidie melalui Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Pidie yang didalamnya Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Pidie telah melaksanakan refocussing dan realokasi APBD untuk Kegiatan Percepatan Penanganan Covid-19. Hambatan yang dialami pemerintah Kabupaten Pidie dalam melaksanakan *refocusing* dan realokasi APBD yaitu banyaknya peraturan yang keluar dalam kurun waktu yang singkat dan perangkat daerah telah menjalankan program dan kegiatan.

**Kata kunci:** *Refocussing*, Realokasi, APBD.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Penyebaran COVID-19 yang terus meningkat mengakibatkan perekonomian yang ada di Indonesia semakin terpuruk banyak tenaga kerja lapangan yang harus di kerja rumahkan untuk memutus rantai penyebaran virus tersebut. Menanggapi hal tersebut untuk menjaga stabilitas keuangan presiden Indonesia Joko Widodo mengambil langkah dan kebijakan yang sangat baik untuk menyelamatkan perekonomian dan stabilitas keuangan negara dengan diberlakukan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Corona Virus Disaese 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Dilansir dari Serambinews.com Tim Anggaran Pemrintah Kabupaten Pidie telah selesai melakukan refocusing anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Pidie tahun 2021 sekitar Rp.93 miliar. Pelaksanaan refocusing di Kabupaten Pidie dilakukan dengan dua tahap, tahap pertama dilakukan refocusing sekitar Rp.27 miliar, pada tahap kedua dilaksanakan refocusing sekitar Rp. 65 miliar. Dana yang telah di refocusing tersebut di anggarkan untuk RSUD Tgk Chik Di Tiro yang merupakan rumah sakit rujukan untuk penanganan COVID-19, untuk penyediaan jaringan pengamanan sosial di Dinas Sosial, untuk penyediaan pengamanan dampak ekonomi yang ditempatkan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM), anggaran hasil refocusing juga di alihkan ke UMKM, Dinas Pertanian dan Pangan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Refocusing dan realokasi anggaran yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pidie ini merupakan respon terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan turunnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7. Alasan penulis melakukan penelitian ini adalah pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran dan pendapatan belanja daerah sangat penting dilaksanakan. Pertama untuk menjaga stabilitas pengelolaan keuangan yang ada di daerah. Kedua pelaksanaan refocusing dan realokasi APBD bertujuan untuk penanganan kesehatan dan dampak ekonomi.

### 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan *refocussing* dan realokasi APBD Tahun Anggaran 2021 di Kabupaten Pidie antara lain adanya beberapa perubahan anggaran yang terjadi pada penjabaran APBD tahun anggaran 2021 dan Laporan Realisasi Anggaran 2021. Dilihat dari data di atas adanya penurunan target dari pendapatan transfer yang awalnya di targetkan Rp. 1.809.426.926.633 turun hingga Rp. 1.782.187.969.633 sehingga mempengaruhi pendapatan daerah

yang awalnya ditargetkan Rp. 2.099.593.454.553 pada realisasi anggarannya hanya Rp. 2.072.354.497.553, namun dengan adanya peningkatan belanja modal yang awalnya Rp. 241.077.518.457 meningkat menjadi Rp. 239.031.876.191, kemudian untuk belanja transfer tak terduga Rp. 5.580.000.000 naik menjadi Rp. 6.340.065.781 akibat dari peningkatan belanja Kabupaten Pidie memiliki defisit anggaran sekitar Rp. 3.500.000.000.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Edy Sudaryanto yang berjudul “Strategi Realokasi APBD Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah “X””. Penelitian tersebut membahas tentang alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocussing) BTT untuk penanggulangan pandemic covid-19 yaitu untuk dibelanjakan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan berupa alat pelindung diri bagi tenaga medis dan petugas-petugas yang berhadapan langsung dengan korban covid-19 kemudian menyediakan masker, hand sanitizer, vitamin c, vitamin e dan sarung tangan serta alat kesehatan lainnya; Penyediaan tempat isolasi bagi pasien atau warga yang menjadi daftar Pasien Dalam Pengawasan (PDP) ataupun bagi Orang Dalam Pengawasan (ODP); pemberian insentif kepada tenaga medis yang terlibat langsung dengan penanganan wabah Covid-19; dan penyemprotan disinfektan di beberapa sudut kota.

Penelitian selanjutnya berjudul “Public Trust Building Strategy Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah: Telaah proses Refocussing dan Realokasi APBD dalam Upaya Penanganan Pandemi Covid-19” yang dilakukan oleh Deden Rafi Syafiq Rabbani. Pada penelitian tersebut dibahas proses refocusing dan realokasi APBD dalam pengelolaan keuangan daerah harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian mengingat dalam situasi pandemi memberikan arah serta kebijakan dan keadaan hukum baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Proses refocusing dan realokasi APBD dalam pengelolaan keuangan daerah harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian mengingat dalam situasi pandemi memberikan arah serta kebijakan dan keadaan hukum baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Proses tersebut juga harus dapat mewujudkan public trust building strategy dalam pengelolaan keuangan daerah agar masyarakat dapat memberikan kontrol serta pengawasan

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan penulis akan lebih fokus kepada permasalahan atau hambatan yang ada pada pelaksanaan refocusing dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut dalam rangka penanganan covid-19 di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh.

### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan refocusing dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam penanganan covid-19 di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh dan untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan refocusing dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam penanganan covid-19 di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh..

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan penelitian dengan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif ini bertujuan agar penulis dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena yang terjadi serta dapat menggambarkan secara sistematis dan aktual permasalahan yang berlangsung pada objek

penelitian. Metode penelitian kualitatif dinamakan juga dengan metode pospositivistik karena berlandaskan pada filsafat pospositivisme (Sugiyono: 2019). Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 7 orang informan yang terdiri dari Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Pidie, Kepala Bidang Anggaran BPKK, Kepala Bidang Perbendaharaan, Kepala Bidang Aset dan Kekayaan Daerah, Kepala Bidang Pendapatan, Subbid Perencanaan Anggaran, dan staff bidang anggaran BPKK Kabupaten Pidie masing-masing 1 orang. Adapun analisisnya menggunakan teori implementasi kebijakan yang digagas oleh Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2017) yang menyatakan bahwa terdapat enam variabel yang mendukung implementasi kebijakan yaitu standar/ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, ciri atau karakteristik badan/instansi pelaksana, komunikasi antar organisasi dan kegiatan implementasi, sikap para pelaksana dan kondisi ekonomi, sosial, dan politik.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Pelaksanaan *Refocussing* dan Realokasi APBD Kabupaten Pidie**

##### **3.1.1 Standar/Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

Pelaksanaan *refocussing* dan realokasi APBD dilakukan seiring dengan perubahan dampak Covid-19 yang kian meluas. *Refocussing* dan realokasi APBD ini dilakukan sebagai stimulus pemerintah untuk menjaga perekonomian dan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Kemudian, hasil dari rasionalisasi APBD yang dilakukan berdasarkan petunjuk Instruksi Menteri Dalam Negeri Tahun 2021 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah ini di tuangkan dalam laporan APBD.

Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan *refocussing* dan realokasi APBD ini adalah untuk percepatan penanganan Covid-19 dan juga antisipasi dampak dari penyebaran Covid-19. Anggaran hasil rasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pidie telah diarahkan untuk kegiatan pencegahan dana penanganan dampak Covid-19 seperti yang diamanatkan dalam PERPPU Nomor 1 Tahun 2020. Tidak hanya sampai disini, pelaksanaan *refocussing* dan realokasi APBD Tahun Anggaran 2021 di Kabupaten Pidie ternyata terjadi sebanyak 2 (dua) tahap. Pada *refocussing* dan realokasi tahap pertama alokasi anggaran difokuskan kepada penanganan serta antisipasi dampak penyebaran Covid-19. Sedangkan, pada tahap kedua alokasi anggaran difokuskan untuk pemulihan ekonomi yang mengalami kontraksi akibat dari pandemi Covid-19. Pada Pelaksanaan *Refocusing* pada tahap pertama dan kedua diplotkan untuk Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perikanan, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Komunikasi Informatika dan Sandi, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

##### **3.1.2 Sumber-sumber Kebijakan**

Sumber-Sumber Kebijakan, pada hakikatnya merupakan pendanaan maupun insentif yang dapat mendorong pelaksanaan suatu kebijakan berjalan dengan efektif. Tujuan dari ditetapkannya Kebijakan *Refocussing* dan Realokasi ini memiliki tujuan paling utama yakni menjaga stabilisasi perekonomian masyarakat dan nasional. Dalam hal ini untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan *refocussing* dan realokasi APBD ini maka digunakan anggaran yang berasal dari rasionalisasi belanja daerah yang dilakukan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala

Bidang Perbendaharaan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan refocussing dan realokasi dilakukan dengan berpegang kepada APBD yang telah disusun dengan memperhatikan kondisi realisasi capaian target yang telah dilakukan oleh tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Pembangunan yang telah berjalan maupun yang baru saja disepakati bersama pihak ketiga terpaksa harus dihentikan. Selain itu, pelaksanaan refocussing dan realokasi APBD ini berdampak terhadap sasaran RPJMD yang berkurang, kemudian pelaksanaan refocussing dan realokasi ini juga berdampak terhadap operasionalisasi kantor. Anggaran yang ditujukan untuk operasionalisasi kantor berkurang, untuk menyeimbangkan hal tersebut maka ditetapkanlah kebijakan Work From Home (WFH). Dengan ditetapkannya kebijakan ini para pegawai akan bekerja dari rumah, maka dengan itu otomatis biaya operasionalisasi kantor akan berkurang.

Pelaksanaan perubahan anggaran ini sebenarnya sering terjadi didalam APBD apalagi ketika terdapat hal yang dinilai tidak sesuai dengan asumsi KUA. Hanya saja pelaksanaan refocussing dan realokasi ini dilakukan dalam jumlah yang cukup besar dan waktu yang relative singkat. Kemudian untuk melakukan perubahan pada APBD pada tahun 2021 kemarin, maka kepala daerah Kabupaten Pidie mengajukan rancangan perubahan APBD dengan memfokuskan anggarannya terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 serta dampak yang ditimbulkan dari penyebaran Covid-19 di Kabupaten Pidie. Pandemi Covid-19 menyebabkan tidak stabilnya keuangan negara sehingga pemerintah pusat perlu menyediakan dana untuk penanganan pandemi Covid-19 seperti dana bantuan sosial, dana insentiif, dll. Maka Kementrian Keuangan mengambil langkah untuk melakukan pemangkasan terhadap dana transfer ke daerah yang tentu sangat berpengaruh terhadap postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perubahan postur APBD akibat dipangkasnya dana transfer ke daerah mengakibatkan Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan ini menjelaskan bahwa Pandemi Covid-19 telah berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional yang melambat, berkurangnya penerimaan negara serta bertambahnya belanja dan pembiayaan negara, sehingga pemerintah perlu melakukan upaya untuk menyelamatkan perekonomian nasional dan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang menjelaskan bahwa terjadi perubahan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sesuai dengan yang disampaikan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 bahwa terjadi penurunan pada pendapatan negara dan meningkatnya jumlah belanja dan pembiayaan negara. Setelah pelaksanaan refocussing dan realokasi akan terdapat selisih antara anggaran sebelum dirasionalisasi dan anggaran setelah dirasionalisasi, hasil selisih anggaran itu lah yang kemudian digunakan untuk mendanai kegiatan terkait penanganan penyebaran covid-19. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dana yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan daerah yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 dan juga kegiatan yang dilaksanakan oleh gugus tugas penanganan Covid-19 di Kabupaten Pidie menggunakan dana yang berasal dari hasil refocussing dan realokasi APBD Kabupaten Pidie.

### **3.1.3 Komuniiasi antar Organisasi dan Kegiatan Implementasi**

Dengan batas waktu yang singkat pelaksanaan refocussing dan realokasi APBD cukup menyulitkan pemerintah daerah, ditambah lagi kebijakan-kebijakan terkait dengan pelaksanaan refocussing dan realokasi APBD keluar secara bertahap sehingga perlu dilakukan penyesuaian

kembali sesuai dengan kebijakan yang baru dikeluarkan. Kebijakan-kebijakan yang keluar secara bertahap ini cukup menyulitkan bagi pemerintah daerah yang mengharuskan pemerintah daerah Kabupaten Pidie bekerja ekstra.

Rasionalisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Pidie telah sesuai dengan yang diamanatkan oleh pemerintah pusat walaupun pada saat pelaksanaannya sedikit mengalami keterlambatan. Namun pemerintah Kabupaten Pidie telah melaksanakan Refocusing dengan sangat baik sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat dapat tercapai. Pembagian dana yang telah diplotkan oleh pemerintah Kabupaten Pidie juga tepat sasaran sehingga penyebaran kasus COVID-19 dan dampak dari penyebaran COVID-19 dapat dikendalikan. Dana yang diplotkan untuk UMKM sangat membantu masyarakat menengah kebawah pada saat pandemi ini, karena yang paling merasakan dampak dari COVID-19 ini adalah masyarakat menengah kebawah. Namun dengan adanya pelaksanaan refocusing dan realokasi APBD dampak dari COVID-19 ini dapat dikendalikan.

#### **3.1.4 Sikap Para Pelaksana**

Sikap para pelaksana, keberhasilan untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan kebijakan bergantung pada intensitas sikap para pelaksana, pada saat pelaksanaan kebijakan pemahaman para pelaksana sangat dibutuhkan. Ketika para pelaksana tidak memahami dengan jelas bagaimana mekanisme pelaksanaan dan apa tujuan dari pelaksanaan maka dapat dipastikan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut akan gagal. Pada awalnya kepala perangkat daerah yang tetap mempertahankan program dan kegiatan yang tengah mereka laksanakan belum memahami dengan jelas perintah yang diturunkan dari pemerintah pusat, ini yang kemudian mengakibatkan proses rasionalisasi anggaran berjalan dengan lambat. Mengatasi hal tersebut Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TPAK) mengadakan rapat kembali untuk membahas rasionalisasi pergeseran anggaran tahun 2022. Proses pelaksanaan refocussing dan rasionalisasi ini melibatkan Tim Anggaran Pemerintah dan kepala perangkat daerah. Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama dengan Kepala Perangkat Daerah mengadakan beberapa kali rapat untuk membahas rasionalisasi APBD.

#### **3.1.5 Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik**

Di tengah meningkatnya jumlah penduduk yang kehilangan pekerjaan dan menurunnya tingkat perekonomian masyarakat akibat pandemi covid-19, pemerintah mengarahkan untuk melakukan refocussing dan realokasi anggaran. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut merupakan stimulus untuk menjaga perekonomian masyarakat dan nasional. Hasil dari rasionalisasi anggaran kemudian yang digunakan untuk kepentingan masyarakat di tengah pandemi covid-19 ini. pelaksanaan refocussing dan realokasi APBD ini tampaknya sedikit membantu masyarakat di tengah kesulitan keuangan yang mereka alami. Pemecatan besar-besaran yang terjadi akibat dari tutupnya kawasan wisata lagoi dan juga pembatasan aktifitas diluar rumah yang kemudian menyulitkan mereka untuk bekerja menjadi faktor utama turunnya perekonomian masyarakat di Kabupaten Pidie, sehingga dengan adanya Bantuan Langsung Tunai yang merupakan hasil dari Refocussing dan Realokasi APBD ini sangat membantu masyarakat. Dengan adanya bantuan langsung tunai ini keadaan ekonomi masyarakat menengah kebawah dapat tertolong karena banyak masyarakat yang menjadi pengangguran yang di akibatkan oleh Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dengan mengambil langkah yang sangat cepat oleh pemerintah pusat dan di tindak lanjuti oleh pemerintah Kabupaten Pidie dampak dari penyebaran COVID-19 dapat dikendalikan dengan maksimal terutama dalam pengendalian penyebaran COVID-19 di Kabupaten Pidie sangat baik dapat dilihat bahwa dari tanggal 1 Desember 2021 sampai 4 Februari 2022 jumlah yang positif COVID-19 adalah 2.550 tidak ada perubahan dengan total kasus aktif 3 orang. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Pidie berhasil menekan penyebaran COVID-19 dan pemerintah Kabupaten Pidie dapat membantu perekonomian masyarakat menengah ke bawah.

Masyarakat menengah kebawah adalah kelompok masyarakat yang sangat merasakan dampak dari COVID-19 ini, banyak kerugian yang di dapatkan dari para pelaksana UMKM yang ada di Kabupaten Pidie, dengan adanya bantuan langsung tunai dapat meringatkan sedikit beban yang ada bagi pelaksana UMKM terlebih lagi pemerintah Kabupaten Pidie memplotkan khusus dana yang di refocusing ke Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang sangat membantu para pengusaha UMKM yang ada di Kabupaten Pidie. Pemerintah Kabupaten Pidie memplotkan dana sebanyak Rp. 6 miliar untuk memberikan bantuan kepada para pemilik UMKM dana yang diberikan disalurkan melalui ke Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

### **3.2. Hambatan dalam pelaksanaan *Refocussing* dan Realokasi APBD**

Terdapat beberapa hambatan yang penulis identifikasi terkait pelaksanaan refocussing dan realokasi APBD meliputi banyaknya peraturan yang keluar dalam kurun waktu yang singkat, kurang tanggapnya pemerintah terhadap arahan terbaru dari pemerintah pusat, serta perangkat daerah sudah menjalankan program dan kegiatan.

#### **3.2.1 Banyaknya Peraturan Baru yang Diterima Pemerintah Daerah dalam Kurun Waktu yang Singkat**

Peraturan yang turun secara bertahap dalam waktu yang singkat ini cukup menyulitkan pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus melakukan rasionalisasi anggaran sesuai dengan kebijakan yang baru saja diturunkan kepada pemerintah daerah dengan tenggang waktu yang sangat singkat. Turunnya peraturan secara bertahap kepada pemerintah daerah ini sebenarnya bertujuan untuk memperjelas maksud, tujuan serta mekanisme pelaksanaan refocussing dan realokasi APBD. Akan tetapi, tenggang waktu yang singkat yang diberikan pemerintah pusat untuk melaksanakan refocussing dan realokasi APBD ini mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan rasionalisasi sesuai dengan kebijakan yang baru.

#### **3.2.2 Perangkat Daerah Telah Menjalankan Program dan Kegiatan**

Penyebab terlambatnya pelaksanaan refocussing dan realokasi APBD Kabupaten Pidie juga dikarenakan terlambatnya laporan penyesuaian yang diserahkan oleh perangkat daerah. Perangkat Daerah menyatakan bahwa mereka kesulitan melakukan refocussing dan realokasi anggaran dikarenakan beberapa program dan kegiatan yang berada pada Triwulan I sudah berjalan ditambah lagi kerjasama dengan pihak ketiga sudah dijalin. Sehingga mereka kesulitan melakukan penyesuaian anggaran.

### **3.3. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Refocussing dan Realokasi APBD**

#### **3.3.1 Dalam Mengatasi Hambatan Akibat Banyaknya Peraturan Baru yang Diterima Pemerintah Daerah dalam Kurun Waktu yang Singkat.**

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pidie untuk mengejar ketertinggalan akibat banyaknya peraturan yang turun secara bertahap dalam waktu yang sangat singkat dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Berkoordinasi Dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Untuk Percepatan Pengumpulan Laporan Penyesuaian.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie mengarahkan kepada kepala perangkat daerah untuk mempercepat proses penyesuaian anggaran yang mereka gunakan untuk program dan kegiatan yang mereka jalankan. Dengan percepatan pengumpulan laporan

penyesuaian oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah secara otomatis akan mempercepat rasionalisasi anggaran yang akan dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TPAK)

b. Meningkatkan Intensitas Pelaksanaan Rapat Pembahasan Penyesuaian APBD

Untuk mempercepat proses rasionalisasi APBD dan melakukan penyesuaian sesuai dengan kebijakan terbaru, Tim Anggaran Pemerintah Daerah berinisiatif meningkatkan intensitas pelaksanaan rapat pembahasan rasionalisasi anggaran. Dengan demikian, diharapkan dapat melakukan penyesuaian lebih cepat dengan kebijakan yang baru.

c. Dalam Mengatasi Kendala yang Dialami Oleh Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dalam melaksanakan penyesuaian anggaran sesuai dengan yang diarahkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengalami kendala dikarenakan pada Triwulan I sudah terdapat beberapa program dan kegiatan yang sedang berjalan dan juga telah menjalin kontrak dengan pihak ketiga. Hal ini yang kemudian membuat perangkat daerah kebingungan dalam melakukan penyesuaian anggaran. Mengatasi hal tersebut pemerintah daerah Kabupaten Pidie melakukan langkah-langkah diantaranya mengadakan rapat bersama kepala perangkat daerah mengenai rasionalisasi anggaran, menetapkan keputusan sepihak oleh tim anggaran pemerintah kabupaten, dan menetapkan petugas untuk memeriksa kebijakan khusus terkait dengan pelaksanaan *refocussing* dan realokasi APBD.

### 3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Program *refocussing* dan realokasi APBD di Kabupaten Pidie merupakan dampak dari adanya pandemic covid-19 yang menyebabkan keuangan negara menjadi tidak stabil. Penulis menemukan temuan penting yakni dalam pelaksanaan *refocussing* dan realokasi APBD, Kabupaten Pidie adapun hambatan yang ditemui adalah dimana para kepala perangkat daerah terlambat dalam menyerahkan laporan penyesuaian anggaran dikarenakan beberapa program sedang berjalan dan sudah dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Penulis juga mendapatkan temuan bahwa anggaran hasil pelaksanaan *refocussing* dan realokasi APBD Tahun Anggaran 2021 di Kabupaten Pidie telah diarahkan untuk melakukan antisipasi dampak penyebaran covid-19 layaknya temuan pada penelitian yang dilakukan oleh Edy Sudaryanto. Penulis juga mendapatkan temuan bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020, pemerintah Kabupaten Pidie membentuk gugus tugas percepatan penanganan covid-19 daerah untuk melakukan penanganan covid-19 yang seluruh kegiatannya didanai oleh APBD Kabupaten Pidie. Selain itu dengan adanya Bantuan Langsung Tunai yang merupakan hasil dari *refocussing* dan realokasi APBD di Kabupaten Pidie sangat membantu masyarakat menengah kebawah yang mana banyak pengangguran yang diakibatkan oleh PPKM.

## IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pidie melalui Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Pidie yang didalamnya Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Pidie telah melaksanakan *refocussing* dan realokasi APBD untuk Kegiatan Percepatan Penanganan Covid-19. Hambatan maupun kendala yang dialami pemerintah daerah Kabupaten Pidie dalam melaksanakan *Refocussing* dan Realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pidie antara lain yaitu banyaknya peraturan yang keluar dalam kurun waktu yang singkat dan perangkat daerah telah menjalankan program dan kegiatan. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pidie untuk mengejar



ketertinggalan akibat banyaknya peraturan yang turun secara bertahap dalam waktu yang sangat singkat dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk percepatan pengumpulan laporan penyesuaian dan meningkatkan intensitas pelaksanaan rapat pembahasan penyesuaian APBD.
2. Mengadakan rapat bersama kepala perangkat daerah mengenai rasionalisasi anggaran dan menetapkan keputusan sepihak oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kabupaten saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Van Meter dan Van Horn.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan *refocussing* dan realokasi APBD di Kabupaten Pidie untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Pidie beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- Rabbani, D. S. (2020). *Public Trust Building Strategy Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah: Telaah proses Refocusing dan Relokasi APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Dalam Upaya Penangan Pandemi COVID-19*. 74.
- Sudaryanto, E. (2020). *Strategi Realokasi APBD Untuk Penanggulangan Pamdemi Covid-19*. 239.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian dan Pengembangan: Research and Development*. Bandung : Alfabeta.
- Wahab, S. A. (2017). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara